



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 54
TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK DAN BERGELOMBANG
(Studi kasus: di desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum (S.H)



Oleh :

HIJRAH NOVriti

NIM:11627203943

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020M/1441H**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa berdasarkan Perbup Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan Kepala desa serentak dan bergelombang (Studi kasus: di Desa Rumbio kecamatan Kampar kabupaten Kampar)”* yang ditulis oleh:

Nama : HIJRAH NOVRITI


NIM : 11627203943

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Syawal 1441 H
18 Juni 2020 M

Pembimbing Skripsi


DR. ABU SAMAH, MH.
NIK. 130217087

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN BERGELOMBANG (Studi kasus: di desa Rumbio kecamatan Kampar kabupaten Kampar)"* yang ditulis oleh :

Nama : HIJRAH NOVRITI
 NIM : 11627203943
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
 Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris

Ilham Akbar, SH., MH

Penguji I

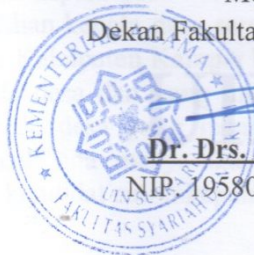
Muslim, S.Ag.,SH., M.Hum

Penguji II

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Penelitian ini membahas berjudul “Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Berdasarkan pelaksanaan kampanye tersebut terdapat pasal yang dilarang terutama di Pasal 43, Pelaksanaan kampanye dilarang : Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten; Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Desa lainnya; Menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perorangan atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa; Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa; Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa; Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lainnya; Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya/jalan desa sehingga dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum; Menggunakan fasilitas Negara dan/atau Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa; dan Menggunakan tempat ibadah.

Dari ketentuan tersebut sudah dijelaskan hal-hal yang dilarang saat melakukan kampanye, namun kenyataannya dalam pelaksanaan kampanye tahun 2019 di Desa Rumbio masih ada di antara calon kepala desa yang melakukan pelanggaran yang terdapat didalam Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019.

Dari latar belakang tersebut, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan kampanye kepala desa serentak dan bergelombang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kampanye kepala desa serentak dan bergelombang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara jelas. Dengan tehnik pengumpulan data melalui oservasi, wawancara, angket, dan studi kepustakaan.

Dari hasil penyajian data yang diperoleh diketahui bahwa pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar belum berjalan dengan semestinya. Masih adanya calon kepala desa dan yang melakukan pelanggaran, diantaranya masih ada nya calon kepala desa yang menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye dan masih ada masyarakat yang menjadi tim sukses yang saling menghina terhadap kandidat calon kepala desa lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Bergelombang (Studi kasus : di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Abbas dan Ibunda Mirafi serta ke-tiga saudara penulis yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. H.Akhmad Mujahidin, M.Ag Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr.Drs. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Firdaus, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
6. Bapak Dr. ABU SAMAH, SH.,M.H. Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Firdaus, S.H.,M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum A, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis,

HIJRAH NOVRITI

NIM: 116267203943



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Rumbio	17
B. Organisasi Pemerintahan Desa Rumbio.....	20
C. Lembaga Kemasyarakatan Desa Rumbio	22
D. Sarana dan Prasarana Desa Rumbio.....	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Desa.....	25
B. Pemerintahan Desa	28
C. Kepala Desa	31
D. Rekrutmen/Pemilihan.....	33
E. Prosedur dan Mekanisme Pemilihan Kepala Desa.....	35
F. Pelaksanaan Kampanye.....	37
G. Teori Demokrasi.....	38
H. Teori Kekuasaan.....	42
I. Teori Pemilihan Umum.....	45
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Bergelombang Di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	47
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Bergelombang Di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel	12
Tabel 2.1 Prasarana Pendidikan	23
Tabel 2.2 Prasarana Peribadatan	23
Tabel 2.3 Prasarana Kesehatan	24
Tabel 2.4 Prasarana Olahraga	24
Tabel 4.1 Tanggapan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemilihan Kepala Desa.....	52
Tabel 4.2 Tanggapan Masyarakat Terhadap Penggunaan Fasilitas Negara dan atau Pemerintah, Pemerintah Daerah, Maupun Pemerintah Desa Untuk Melakukan Kampanye	54
Tabel 4.3 Tanggapan Masyarakat Terhadap Penggunaan Tempat Ibadah Untuk Berkampanye.....	55
Tabel 4.4 Tanggapan Masyarakat Terhadap Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aturan Kampanye Pemilihan Kepala Desa	58
Tabel 4.5 Tanggapan Masyarakat Terhadap Penggunaan Tempat Ibadah Untuk Berkampanye.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.....	21
------------	--	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang menganut sistem Demokrasi. Demokrasi itu sendiri diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.¹

Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi yaitu adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi).

Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Demokrasi merupakan sebuah proses, artinya sebuah republik tidak akan berhenti di satu bentuk pemerintahan selama rakyat negara tersebut memiliki kemauan yang terus berubah. Ada kalanya rakyat menginginkan pengawasan yang super ketat terhadap pemerintah, tetapi ada pula saatnya rakyat bosan dengan para wakilnya yang terus bertingkah karena

¹Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kekuasaan yang seakan-akan tak ada batasnya. Pemerintah telah membuat sebuah perjanjian dengan rakyatnya yang ia sebut dengan istilah kontrak sosial. Dalam sebuah republik demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam sebuah pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan masa depan sebuah negara.

Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan yang memberikan kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya. Hal itu telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdapat pada Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi ”pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi”.²

Daerah otonom berhak mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.³ Penjelasan tersebut menegaskan bahwa adanya hak dan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.⁴ Berdasarkan ketiga asas di atas maka daerah dalam menjalankan pemerintahannya memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Dengan adanya otonomi daerah ini maka daerah itu sendiri yang berhak mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri namun tetap berdasarkan aturan yang ada. Dalam pengelolaan

²Undang-undang Negara Indonesia, Pasal 18 A ayat (2).

³Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.3-4.



pemerintahan daerah yang bersifat otonom, segala proses penyelenggaraan di serahkan kepada daerah termasuk penyelenggaraan Pilkadaes yang selanjutnya diatur oleh Perda.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum dalam pasal 1 angka 1 disebutkan pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi pada umumnya, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Keterlibatan seluruh masyarakat dalam pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis.

Termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang selanjutnya disingkat Pilkadaes. Pilkadaes dalam penyelenggaraannya dipilih langsung oleh rakyat, bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan tahapan penyelenggaraannya sama dengan Pilpres dan Pilkada kendati demikian Pilkadaes tidak dimasukkan dalam rezim pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait Pemilu. Pilkadaes seakan menjadi anak tiri dalam pemilihan umum di Indonesia, padahal Pilkadaes pada proses penyelenggaraannya lebih rawan secara sosial, politik dibandingkan pemilu-pemilu yang lain. Pilkadaes selanjutnya di atur khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang sebelumnya diatur Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tentang pemerintahan daerah yang memuat pengaturan daerah sebagai daerah otonom dan mengakui pemerintahan desa sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan dan desa berhak, memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa. Pemilihan kepala desa secara konseptual sangat erat terkait dengan upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki dari adanya otonomi pemerintahan desa itu sendiri, yaitu terciptanya pemerintahan desa yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Adanya otonomi desa berarti adanya pengakuan hak untuk mengatur urusan rumah tanggahnya sendiri dengan dasar dari prakarsa dari masyarakat.⁵

Namun dalam pelaksanaannya hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.⁶ Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Adapun pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat panjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan pedoman pada peraturan pemerintah.⁷

⁵Juliantara,Dadang, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. (Yogyakarta Lappera Pustaka Utama, 2003).h.116.

⁶H.A.W Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada,2003), h.166.

⁷Fajlurrahman jurdi,*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*,(Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2018),h.114.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi desa, karena di dalam penyelenggaraan otonomi di desa kepala desa mengemban fungsi yang penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat desa. Dimana kita ketahui bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDRI) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia.⁹ Pemerintah desa sendiri merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem pemerintahan nasional, pemerintah desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintahan desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan di berbagai bidang dalam masyarakat.

Namun saat ini telah disahkannya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa atau juga yang sering disebut UU desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

⁸Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1.

⁹Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18B ayat (2) .



tentang desa juga ikut mempengaruhi sistem pemilihan kepala desa. Berdasarkan undang-undang desa yang berlaku saat ini, pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Tata cara pemilihan kepala desa serentak di atur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.¹⁰

Berdasarkan pelaksanaan kampanye tersebut terdapat pasal yang dilarang terutama di Pasal 43¹¹ Pelaksanaan kampanye dilarang :

- 1) mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten;
- 2) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Desa lainnya;
- 3) menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perorangan atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa;
- 4) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa;
- 5) mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- 6) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

¹⁰ Undang-undang Nomor 6 tentang Desa, Pasal 31 ayat (1).

¹¹ Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019, Pasal 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lainnya;
- 8) melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya/jalan desa sehingga dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum.
- 9) menggunakan fasilitas Negara dan/atau Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa; dan
- 10) menggunakan tempat ibadah.

Namun kenyataan menurut tokoh agama yang bernama Kamaruzzaman dalam pelaksanaan kampanye tahun 2019 di Desa Rumbio masih ada di antara calon kepala desa yang melakukan pelanggaran. Beliau mengatakan *"masih saja terjadi pelanggaran kampanye di Desa Rumbio, misalnya masjid dipakai untuk berkampanye"*.¹²

Tidak jauh juga di kemukakan oleh tokoh masyarakat Zulkarnain yang menyatakan bahwa *"di Desa ini masih ada terjadi pelanggaran tentang pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh calon kepala desa yang satu kepada calon kepala desa lain"*.¹³

Mengenai pelanggaran tersebut, dikuatkan oleh pernyataan ketua pemuda Eko *"sejak terjadi kampanye calon kepala desa di desa kami, kami kurang menjamin keamanan di desa ini, karena masih adanya kandidat calon kepala desa"*.

¹²Kamaruzzaman(Tokoh Agama Desa Rumbio), *Wawancara*, pada tanggal 18 mei 2020

¹³ Zulkarnain(Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, pada tanggal 18 mei 2010



yang menghina calon kepala desa lain sehingga terjadi perkelahian antar pendukung calon kepala desa sehingga warga menjadi terpecah belah”.¹⁴

Sehubungan dengan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Rumbio, penulis melakukan wawancara dengan Amril Yusar selaku ketua panitia pilkades Desa Rumbio, beliau berkata: *“Pelaksanaan pemilihan kepala desa kita sudah mengikuti aturan pemerintah, walaupun masih ada beberapa orang yang masih saja melakukan kampanye dengan membawa hubungan saudara, saling menjatuhkan, namanya juga masyarakat masih susah diajak patuh walaupun sudah sering dikasih arahan”*.¹⁵

Mengenai hal ini, sekretaris Desa Rumbio mengatakan bahwa: *“di Desa kita yang saya ketahui belum ada calon kepala desa yang menggunakan kantor-kantor yang termasuk fasilitas negara untuk kampanye, karena panitia pilkades desa kita sudah memberitahu kepada para calon untuk tidak melakukannya karena termasuk pelanggaran saat berkampanye, begitu juga dengan penggunaan tempat ibadah”*.¹⁶

Seorang warga Rumbio yang bernama Abbas juga menguatkan dugaan adanya pelanggaran kampanye di Desa Rumbio, beliau mengatakan *“masih ada aja pelanggaran kalau lagi pemilihan kepala desa, contohnya beredar kabar kalau salah satu calon sering korupsi uang desa, kebetulan beliau kepala desa sebelumnya, benar atau tidak dia korupsi belum diketahui, karena kejelasan*

¹⁴ Eko(Tokoh Pemuda), Wawancara, pada tanggal 18 mei 2020

¹⁵ Amril Yusar(Ketua Panitia Pilkades Desa Rumbio), Wawancara, pada tanggal 18 mei 2020.

¹⁶ Zulfadri(Sekretaris Desa Rumbio), Wawancara, pada tanggal 20 mei 2020



*kabar itu juga tidak tahu dari mana, tapi kabar itu keluar pas mau pemilihan kepala desa yang lalu”.*¹⁷

Untuk mengetahui pelaksanaan kampanye di desa rumbio, penting bagi penulis untuk mengadakan penelitian tentang **“PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN BERGELOMBANG DI DESA RUMBIO KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberikan pembatasan masalah dalam penelitian ini pada pasal 43 tentang hal yang dilarang saat kampanye pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan kampanye pemilihan desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ?
- 2) Apa saja faktor penghambat pelaksanaan kampanye pemilihan desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala

¹⁷Abbas(warga Desa Rumbio), Wawancara, pada tanggal 25 mei 2020



desa serentak dan bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah:

- 1) Manfaat teoritis
 - a) Hasil Penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum tata Negara.
 - b) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan penelitian yang penulis teliti.
- 2) Manfaat praktis
 - a) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atas praktisi hukum dan instansi hukum terkait tentang pelaksanaan kampanye pemilihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan Kepala Desa serentak dan bergelombang.

b) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah kabupaten kampar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁹

1) Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan faktafakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak dalam pelaksanaan kampanye pemilihan desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau

¹⁸ HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (Surakarta:UN Press, 1999), h.89.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:sinar Grafika,2011), h.24.



keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

2) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar karena masih terdapatnya masalah di desa tersebut sesuai dengan yang penulis jelaskan pada latar belakang.

3) Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁰ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

b) Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²¹

TABEL 1.1
POPULASI DAN SAMPEL

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Ketua Panitia Pilkades	1 orang	1 orang	100%
2	Sekretaris Desa	1 orang	1 orang	100%
3	Tokoh agama	1 orang	1 orang	100%
4	Tokoh masyarakat	1 orang	1 orang	100%
5	Tokoh pemuda	1 orang	1 orang	100%
6	Masyarakat	3054 orang	30 orang	0,98% %

Sumber data : Kantor Kepala Desa Rumbio 2020

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo,2011), h.118.

²¹ *Ibid*, h.119.



4) Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan rincian sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung.²² melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²³ Bahan hukum primer disini adalah berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab secara langsung.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.47.



pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah :

- a) Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.
- b) Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- c) Angket yaitu suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis.
- d) Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data tulisan, baik itu dokumen maupun arsip-arsip lainnya, dan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6) Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁴

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Didalam Bab II ini penulis akan menyusun kerangka tulisan tentang keadaan umum lokasi penelitian di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Penjelasan didalam bab ini penulis memuat ringkasan kajian pustakanya seperti pelaksanaan kampanye pilkades dan sub-subnya.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab pembahasan ini merupakan bagian dari analisa kasus yang akan dikembangkan kedalam bentuk kajian yang dapat dijadikan suatu bahasan dilingkup penelitian. Di samping itu penulis akan membahas dan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembang rumusan masalahnya seperti, pelaksanaan kampanye pemilihan desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan faktor penghambat pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Rumbio

Desa Rumbio diambil dari nama tumbuhan Rumbio. Ketika zaman penjajahan, rakyat Rumbio sangat gigih melawan penjajah, sehingga anak Rumbio diartikan dengan tahan pancung.

Sebelum Indonesia merdeka Rumbio pada mulanya merupakan suatu negeri yang disebut negeri Rumbio. Negeri Rumbio dipimpin oleh seorang wali negeri, dimana wilayah pemerintahannya terdiri dari lima wilayah, setiap wilayah dipimpin oleh wali kampung, yaitu Kampung Rumbio, Kampung Padang Mutung, Kampung Alam Panjang, dan Kampung Pulau Payung.

Sekitar tahun 1977 status Pemerintahan Kenegerian Rumbio dihapuskan, 5 (lima) wilayah Kampung di desa rumbio diangkat menjadi Wali Muda dengan SK.Nomor.95/Kpts/I/2/1977 tertanggal 31 Agustus 1977. Kemudian sesuai dengan keputusan Bupati Kampar Nomor.077/Kpts/XI/1981 Wali Muda berubah menjadi Kepala Desa.

Dengan demikian Pemerintahan Kenegerian Rumbio dipecah menjadi lima Desa, yaitu : Desa Rumbio, Desa Padang Mutung, Desa Alam Panjang, Desa Pulau Payung, dan Desa Teratak. Berdasarkan Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Kpts.187/VI/1981 tanggal 16 November 1981 status desa ditetapkan menjadi Desa Defenitif.

Desa Rumbio Kecamatan Kampar memiliki wilayah 1887 Km. Desa Rumbio berada di Kecamatan Kampar, yang merupakan asal pemukiman



penduduk seluas 28 Ha/M², areal persawahan 320 Ha/M², dan 536 Ha/M² adalah areal perkebunan. Luas areal kuburan 2,025 Ha/M², luas pekarangan adalah 0,025 Ha/M², sedangkan perkantoran seluas 0,125 Ha/M². Dengan ketinggian tempat dari permukaan tanah adalah 38 M².

Adapun batas-batas wilayah Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya.
- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Gunung Sahilan.
- 3) Sebelah Barat berbatas dengan Desa Penyasawan dan Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar.
- 4) Sebelah Timur berbatas dengan Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar

Pemerintahan Desa Rumbio memiliki jarak dengan ibu kota Kecamatan sekitar 1,3 Km, dengan perjalanan selama seperempat jam dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Jarak dengan Ibu kota Kabupaten adalah 14,5 Km dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah setengah jam. Sedangkan jarak ke ibu kota provinsi Riau adalah 44,5 Km. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan menggunakan kendaraan bermotor adalah satu jam.

Sepanjang desa Rumbio terletak di pinggir jalan raya Pekanbaru-Bangkinang yang mudah diakses dengan kendaraan bermotor maupun berjalan kaki. Namun demikian Desa Rumbio tetap asri jauh dari polusi. Di sepanjang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

banyak terdapat pepohonan yang rindang bahkan ada yang berumur ratusan tahun. Desa Rumbio memiliki hutan produksi seluas 42 Ha/M², dan hutan adat seluas 483 Ha/M².

Sehingga curah hujan yang dihasilkan adalah 3000 Mm, Kelembaban udara 5-10%, suhu rata-rata harian adalah 28°. Dengan demikian Desa Rumbio berpotensi sebagai penghasil budidaya perikanan, dengan penghasilan 12.000 ton/tahun. Hasil dari potensi tersebut dijual langsung ke konsumen dan pengecer. Dengan adanya hutan tersebut memungkinkan Desa ini memiliki sungai, bendungan, waduk atau situ, serta mata air. Potensi ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membudidayakan ikan. Oleh karena itu masyarakat membuat keramba di sungai serta empang atau kolam yang sampai saat ini seluas 9 Ha/M².

Desa Rumbio memiliki fasilitas umum seperti pasar. Walaupun sedikit ramai namun polusi dari kendaraan tidak mampu menghilangkan kesegaran udaranya. Hal ini dikarenakan Karbondioksida yang dihasilkan kendaraan diserap oleh tumbuh-tumbuhan hijau yang ada pada pepohonan hutan lindung dan diganti menjadi Oksigen.

Berdasarkan data dari KAUR Umum Desa Rumbio berjumlah 3.054 jiwa yang terdiri dari 1575 jiwa penduduk laki-laki dan 1479 jiwa penduduk perempuan. Jumlah kepala keluarga mencapai 839 KK dan dengan kepadatan penduduk 120 jiwa per km.

Penduduk Desa Rumbio mayoritas adalah penganut agama Islam. Sedangkan kelompok etnis penduduk yang terdapat di Desa ini adalah Aceh 1 orang laki-laki dan Batak 8 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Mata pencaharian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penduduk desa Rumbio pada umumnya adalah pada bidang pertanian. Potensi hasil pertanian Desa setempat meliputi tanaman pangan, komoditas buah-buahan, dan perkebunan. Disamping itu juga terdapat usaha peternakan masyarakat dan budidaya ikan tawar. Jenis mata pencaharian penduduk Desa lainnya meliputi berbagai profesi antara lain yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang dan sebagainya.

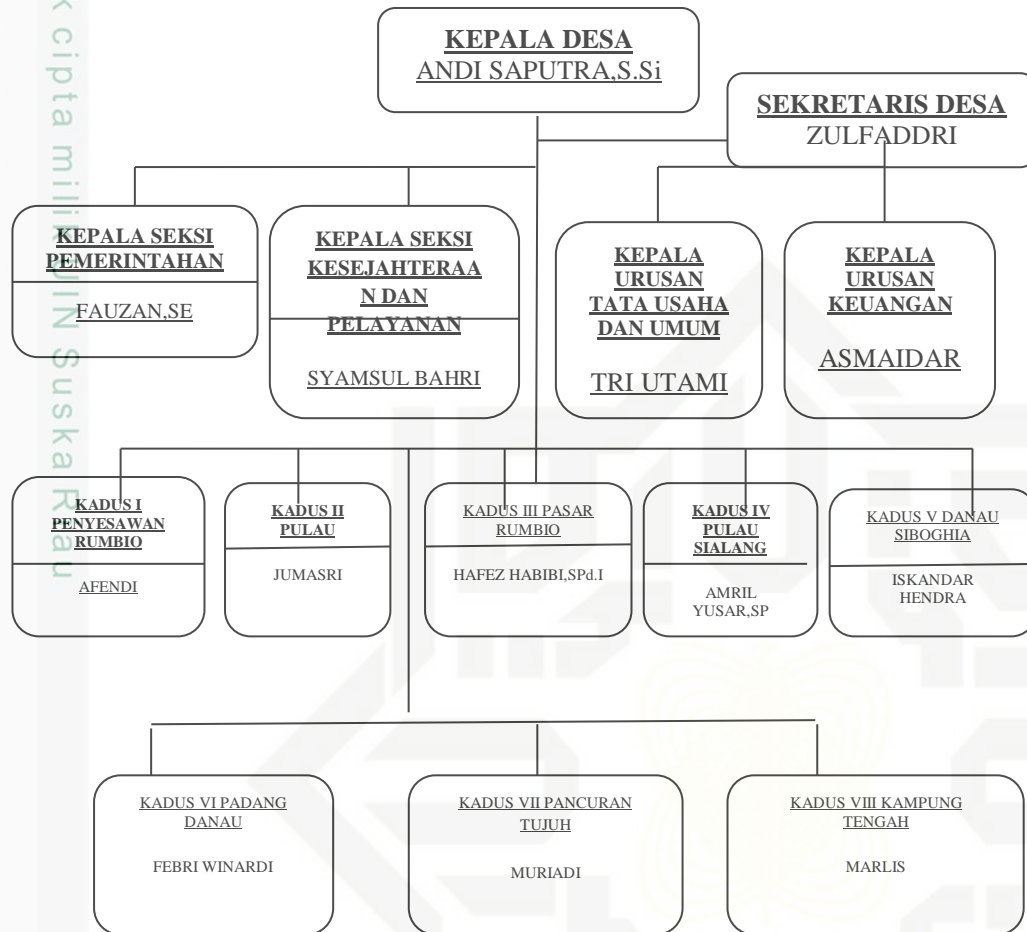
B. Organisasi Pemerintahan Desa Rumbio

Pemerintahan Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu sejumlah perangkat Desa, yaitu :

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Kepala Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
- 4) Kepala Urusan Keuangan
- 5) Kepala Seksi Pemerintahan
- 6) Kepala Seksi Kesajahteraan dan Pelayanan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar I.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rumbio



Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Desa tersebut diharapkan mampu menjalankan tugas-tugas yang telah diembankan berdasarkan jabatannya masing-masing sehingga semua aktivitas Desa mampu berjalan dengan lancar.

Desa Rumbio memiliki delapan dusun yaitu, penyasawan Rumbio, Pulau, Pasar Rumbio, Pulau Sialang, Siboghia, Padang Danau, Pancuran Tujuh, dan Kampung Tengah.

Pemerintahan Desa Rumbio berdasarkan keputusan bersama masyarakat telah menetapkan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD),



Aparatur Pemerintahan Desa, Ketua Dan Anggota Lembaga Pembangunan Pemerintahan Desa (LPM), Ketua Dan Pengurus Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK). Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga pemerintahan Desa telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Rumbio, khusus untuk lembaga BPD keputusan Kepala Desa telah disahkan oleh Bupati Kampar dan lembaga LPM telah disahkan oleh BSPPM Kabupaten Kampar sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 dan perda Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018.

C. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Desa Rumbio :

- 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa: jumlah pengurus 13 orang
- 2) PKK: jumlah pengurus 21 orang
- 3) Rukun Warga (RW) :jumlah pengurus 15 orang
- 4) Rukun Tetangga (RT): 30 jumlah pengurus orang
- 5) Organisasi Pemuda : jumlah pengurus 10 orang
- 6) Organisasi keagamaan: jumlah pengurus 8 orang

D. Sarana dan Prasarana Umum Desa Rumbio

1. Prasarana Pendidikan

Desa Rumbio merupakan Desa yang menyadari akan pentingnya pendidikan. Buktinya anak-anak Desa Rumbio banyak yang bersekolah mulai dari TK sampai dengan perguruan Tinggi yang ada di Ibukota Kabupaten atau Provinsi. Sekolah yang ada dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menyalurkan pendidikan. Akan tetapi untuk melanjutkan sampai perguruan



tinggi, bisa dilanjutkan ke daerah lain. Adapun jumlah sarana Pendidikan yang ada di Desa Rumbio dapat kita lihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.1
Prasarana Pendidikan

No.	Prasarana pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	1
2	Sekolah dasar	1
3	Madrasah Ibtidaiyah	1
4	Madrasah Tsanawiyah	1
5	Madrasah Aliyah	1

Sumber data :Kantor Kepala Desa Rumbio 2020

2. Prasarana Peribadatan

Prasaran peribadatan di Desa Rumbio yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Prasarana Peribadatan

No.	Tempat ibadah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musholla	6

Sumber data :Kantor Kepala Desa Rumbio 2020

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka prasarana peribadatan yang ada di Desa Rumbio yaitu sebanyak 5 unit masjid, dan 6 unit mushalla. Tersedianya



prasarana peribadatan di pedesaan akan mendukung upaya peningkatan pengamalan kehidupan beragama bagi masyarakat desa setempat.

3. Prasarana dan Sarana Kesehatan

Prasarana dan sarana kesehatan di pedesaan sangat berperan dalam memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Desa. Prasarana dan sarana kesehatan yang terdapat di Desa Rumbio yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Prasarana dan Sarana Kesehatan

No.	Sarana kesehatan	Jumlah
1	PUSTU	1
2	POSYANDU	4

Sumber data : Kantor Kepala Desa Rumbio 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa didesa rumbio terdapat sebuah pustu dan 4 posyandu yang masih aktif dan dapat digunakan oleh masyarakat didesa rumbio.

4. Prasarana Olahraga

Prasarana olahraga yang ada di desa Rumbio yaitu seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Prasarana Olahraga

No.	Sarana olahraga	Jumlah
1	Lapangan voli	6
2	Lapangan sepak bola	1

Sumber data : Kantor Kepala Desa Rumbio 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Halalciata milin UIN Suska Riau

Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa

Pengertian desa secara etimologi istilah Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu dari kata *deshi* yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah.²⁵ Dalam kehidupan sehari-hari istilah Desa sering diartikan sebagai suatu wilayah yang letaknya jauh dari keramaian kota serta dihuni oleh kelompok masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya di sektor pertanian. Pengertian tersebut tentu saja ada benarnya, sebab didasarkan atas apa yang bisa dilihat. Namun untuk memperoleh pengertian desa secara lengkap kita perlu memperhatikan definisi dari para ahli yang telah diuji kebenarannya. Berikut ini Beberapa definisi desa:

- a) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- b) Dikemukakan HAW.Widjaja ; “secara historis desa adalah cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia jauh sebelum negara bangsa indonesia ini terbentuk. Struktur sosial

²⁵Totok Gunawan, *Fakta dan Konsep Geografi*, (Jakarta : Inter Plus, 2007),h.103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) sejenis desa, masyarakat adat dan lain-lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri dan relatif mandiri. Hal ini antara lain merupakan wujud bangsa yang paling konkrit.²⁶
- d) Menurut sutardjo kartodikusumo, Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
- e) Menurut S.D Misra, Desa tidak hanya kumpulan tempat tinggal, tetapi juga kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50-1000 ha.
- f) Menurut Paul H. Landis, Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut;
 - 1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal
 - 2) Adanya ikatan perasaan yg sama tentang kebiasaan dan
 - 3) Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, misalnya iklim, topografi, dan sumber daya alam.
- g) Kamus Besar Bahasa Indonesia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip Suhartono disebutkan bahwa desa adalah: Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; kampung; dusun; Udik atau dusun; tempat; tanah; daerah.²⁷

²⁶ H.A.W.Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli dan Bulat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005).h.4.

²⁷ Suhartono, *Politik Loca, Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Laper, 2001) h.9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa dilihat dari sudut pandang hukum dan politik yang telah menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum yang dimana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri²⁸ dan seringkali dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas yang berbeda-beda dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya. Desa sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka

²⁸ Kartohadikoesomo, *Desa*, (Jakarta : PN Balai Sartika, 1984), h. 16.

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015.



desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Selanjutnya mengenai kewenangan desa di atur khusus dalam Permendagri Nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa .³⁰

B. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan suatu sistem dalam penyelenggaraan tata kelola desa. Pembentukan pemerintahan desa bertujuan untuk memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan ciri khas daerah tersebut. Hal tersebut sebenarnya sebagai usaha dalam mewujudkan nilai demokrasi.³¹

Penyelenggaraan pemerintahan desa di bumi nusantara ini bukan adopsi dari sistem negara penjajah melainkan asli dari masyarakat Indonesia. Keaslian itu diakui oleh van vollenhoven dalam bukunya *Staatsrecht overze* bahwa pada tahun 1996 ketika kapal berbendera Belanda yang pertama memasuki perairan kepulauan Indonesia wilayah ini secara hukum ketatanegaraan bukanlah wilayah yang "liar dan kosong". Di sana terdapat setumpuk lembaga-lembaga pengaturan

³⁰ Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.

³¹ Kuantana Magnar, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, (Bandung : CV.Armico, 1984), h.22.



dan kewibawaan, meliputi pemerintahan oleh atau terhadap suku-suku, desa-desa, persekutuan-persekutuan republik dan kerajaan-kerajaan.³²

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-undang Desa.

Sedangkan sebutan Kepala Desa juga menggunakan istilah yang berbeda pada tiap-tiap bagian daerah seperti di daerah Tapanuli Kepala Desa disebut Kepala Nagari, di Sumatra Selatan disebut dengan nama Pesirah, di daerah Jawa disebut dengan Lurah, di daerah Bali disebut Tembukung, di daerah Sulawesi Utara disebut Hukum Tua, di daerah Maluku disebut Kepala Nagari dan di berbagai daerah di papua disebut Kurano. Masih banyak lagi sebutan yang bercorak ragam menurut istilah-istilah daerah setempat yang sebenarnya mempunyai pengertian yang sama.³³

Dari sudut pandang politik dan administrasi pemerintahan, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri.

³² Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005) h. 144.

³³ Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir, *Prospek Perkembangan Desa*, (Bandung : CV Fokus Media, 2007), h. 9 .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Pengertian tersebut termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian dalam pengertian ini, masih belum tergambarkan secara jelas mengenai kualitas otoriter yang dimiliki oleh desa.³⁴

Munculnya otoritas politik di dalam suatu komunitas yang disebut dengan desa secara internal mudah dipahami, dengan melihat sejarah perkembangannya. Secara faktual jumlah penduduk bertambah dan masalah-masalah berkaitan dengan kepentingan masyarakat bertambah. Kenyataan tersebut sudah barang tentu mendorong munculnya suatu otoritas yang diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang merealisasikan aspirasi yang berkembang. Dari berbagai pengertian desa tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan ada beberapa ciri desa secara umum³⁵ :

- 1) Desa umumnya terletak sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi).
- 2) Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
- 3) Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat

³⁴*Ibid*, h. 14.

³⁵*Ibid*, h. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Tidak seperti di kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh dirinya sendiri”.
- 5) Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka.
- 6) Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif ketat dari pada kota.

C. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah di desa. Dengan posisi demikian prinsip pengaturan kepala desa sebagai berikut:³⁶

- a) Sebutan kepala desa disesuaikan dengan sebutan local;
- b) Kepala desa berkedudukan di tingkat desa sebagai pemimpin di desa;
- c) Kepala desa dipilih secara demokratis dan secara langsung oleh masyarakat desa, kecuali ditentukan lain; dan
- d) Pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga kepala desa dilarang untuk menjadi partai politik.

Dalam melaksanakan tugas kepala Desa dituntut untuk mengabdikan dan berintegritas tinggi. Adapun kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugas sesuai Pasal 26 Undang-undang Desa, yaitu:

³⁶Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Raja wali Pers, 2011),h.218.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syariat Islam of Sultan Syarif Kasim

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c) Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d) Mempublikasikan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa yang bersangkutan setiap akhir tahun anggaran.

Adapun fungsi Kepala Desa yaitu :³⁷

- a) Penyelenggarakan pemerintahan desa;
- b) Menetapkan peraturan desa;
- c) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- d) Memegang pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f) Membina kehidupan masyarakat desa;
- g) Membina ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
- h) Membina dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

³⁷ Josef Mario Monteiro, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta Pustaka Yustisia, 2016), h. 127-128.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Rekrutmen/Pemilihan

Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam buku dasar-dasar ilmu politik yang menyebutkan : “Proses mencari mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai”.³⁸ Sedangkan Stoner mendefinisikan rekrutmen sebagai proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk meduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Berdasarkan definisi-definisi mengenai pengertian rekrutmen, maka penulis berpendapat bahwa rekrutmen merupakan upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan seseorang yang dibutuhkan sebagai calon pengisi kekosongan pada jabatan-jabatan tertentu seperti halnya calon Kepala Desa, dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditemukan sebelumnya.

³⁸ Mirriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia, 2000), h. 164.



Prinsip-prinsip Rekrutmen:

Berdasarkan pada pendapat kepala badan kepegawaian nasional, dalam melakukan rekrutmen sudah seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip rekrutmen yaitu:

- 1.) Semua warga Negara mempunyai kedudukan hukum yang sama. Bahwa setiap warga mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh haknya setelah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar yaitu:
 - a) Warga Negara Indonesia.
 - b) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
 - c) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan.
 - d) Berkelakuan baik.
 - e) Sehat jasmani dan rohani.
- 2.) Tidak berdasarkan golongan, agama, ras. Pengangkatan dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas maka penulis berpendapat bahwa prinsip rekrutmen yaitu proses rekrutmen bisa diikuti oleh semua warga Negara tanpa membedakan agama, golongan, dan ras yang telah memenuhi syarat-syarat objektif yang ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Sateislamic university of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Prosedur dan Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui 4 tahapan, yakni sebagai berikut :

a) Persiapan;

- 1) Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- 2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- 3) Laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- 4) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- 5) Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

b) Pencalonan;

- 1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.³⁹
- 2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;

³⁹ Pasal 41, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud ialah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - 4) Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - 5) Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
 - 6) Masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.
- c) Pemungutan Suara;
- 1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - 2) Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - 3) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- d) Penetapan.
- 1) Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permasyarakatan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - 2) Laporan Badan Permasyarakatan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - 3) Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permasyarakatan Desa; dan
 - 4) Bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan



pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Pelaksanaan Kampanye

Pelaksanaan kampanye dilaksanakan berdasarkan aturan pemerintah yang terdapat dalam pasal 40 bahwa:

- 1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyelenggaran pemilihan Kepala Desa.
- 2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah desa yang bersangkutan.
- 3) Kampanye dilaksanakan mulai “H – 6 enam” sampai dengan “H – 3 tiga” dari pelaksanaan Pemungutan suara
- 4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di lokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan dengan Calon.
- 5) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara.
- 6) Panitia Pemilihan menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.
- 7) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh calon Kepala Desa.
- 8) Dalam penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



G. Teori Demokrasi

Demokrasi dapat kita pandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang di dalam UUD 1945 disebut kerakyatan. Demokrasi merupakan pola hidup berkelompok di dalam organisasi Negara, sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup berkelompok tersebut.⁴⁰ Keinginan orang-orang (*demos*) yang berkelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*), falsafah hidup bangsa (*filosofische grondslag*), dan ideologi bangsa yang bersangkutan.

Secara harfiah kata demokrasi tidak asing lagi sebagian besar umat manusia di mana-mana. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa.⁴¹

Jadi Demokrasi adalah rakyat yang berkuasa atau pemerintahan rakyat. Makna demokrasi ini telah dikemukakan oleh R. Kranenburg di dalam bukunya "*Inleiding vergelijkende staatsrechtwetenschap*", perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani di atas, maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.⁴² Artinya suatu sistem pemerintahan negara di mana semua orang adalah berhak memerintah dan diperintah.

Gagasan demokrasi Yunani Kuno pernah hilang ketika bangsa Yunani dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat saat memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Setelah itu munculah *Renaissance* yang menghidupkan kembali kebudayaan Yunani Kuno (1650-1800) yang memberikan pandangan tentang

⁴⁰ Satryo Soemantri B, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 27.

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Loc. Cit.*, h. 105.

⁴² Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, h. 200.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pemisahan antara gereja dan negara. Pandangan ini menghasilkan masa *Aufklarung* (Abad Pemikiran) yang memerdekakan pikiran manusia, sehingga pada masa 1500-1700 monarki absolut mendapat kecaman dari masyarakat. Terjadi pendobrak kedudukan raja-raja absolut berdasarkan teori rasionalistis (*social contract*). Pada sebagai akhir dari pergolakan tersebut, pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkrit sebagai program dan sistem politik.⁴³

Pada dasarnya banyak negara yang memilih sistem demokrasi, karena demokrasi memiliki nilai (*values*) yang menjamin hak dan kewajiban warga negaranya yang lebih humanistik. Demokrasi tumbuh berkembang subur di dalam masyarakat madani, masyarakat yang mencintai kedamaian, ketenangan, dan sejahtera. Demokrasi menjanjikan kehidupan politik yang menjamin ketersediaan pemenuhan hak, sekurang-kurangnya menyampaikan pendapat yang ada di dalam pikiran seseorang, dengan hal ini, membuat manusia berada dalam tempat yang layak sebagai seorang manusia yang seutuhnya.⁴⁴

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang

⁴³ Miriam Budiardjo, *Op.cit*, h. 108

⁴⁴ Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar* (Yogyakarta : Thafa Media, 2012), h. 9.



diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Tujuan demokrasi dikemukakan oleh Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, yang mengatakan: Demokrasi hendaknya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat yang berdaulat dan bermartabat. Demokrasi mencakup peningkatan secara prinsipil komitmen seluruh elemen masyarakat demi kemajuan bersama. Demokrasi menguatkan struktur-massa, pembangunan ekonomi, budaya politik, interaksi elite politik. Dan pendalaman demokrasi membuat struktur-struktur formal demokrasi menjadi lebih liberal, akuntabel, representatif, dan aksesibel.⁴⁵

Henry B. Mayo telah merinci nilai-nilai yang terkandung dalam sistem demokrasi, yaitu;

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga (*institutionalized peacefull settlement of conflict*).
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peacepul change in a changing society*).
- 3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly sucession of rulers*).
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*).

⁴⁵Ibid,h.93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku.

6) Menjamin tegaknya keadilan.⁴⁶

Untuk mengukur kadar demokratisasi suatu negara, Jack Lively menyebutkan tiga Kriteria yang dapat menunjukkan demokratisasi suatu negara, yaitu:

- a) Sejauh mana semua kelompok utama terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan.
- b) Sejauh mana keputusan pemerintah berada di bawah kontrol masyarakat.
- c) Sejauh mana warga negara biasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan administrasi umum.⁴⁷

Demokrasi konstitusional atau biasa disebut dengan istilah *rechtsstaat* (negara hukum),¹⁹ menurut Friedrich Julius Stahl memberikan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Hak-hak asasi manusia.
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal dengan *trias politica*.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*)
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.⁴⁸

⁴⁶Ni'matul Huda, *Op.cit*,h.218.

⁴⁷Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, *Ibid*, h. 74.

⁴⁸Mohammad Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta : Rineka Cipta,2003),h.27-28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan Friedrich Julius Stahl, AV Dicey dari kalangan ahli *Anglo Saxon* memberikan ciri rule of law sebagai berikut:

- 1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangwenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- 2) Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.⁴⁹

Berdasarkan kedua pendapat di atas, tentunya negara hukum memegang teguh kebebasan, persamaan dan kedaulatan rakyat berdasarkan hukum dan menjunjung asas persamaan di depan hukum dan persamaan di bidang politik bagi seluruh golongan.

H. Teori Kekuasaan

Dalam konteks kekuasaan, pengertian sekular berarti bahwa kekuasaan yang dimiliki Negara sepenuhnya ditentukan oleh negosiasi atau perjanjian antara warga Negara. Kedaulatan Negara demokratis sepenuhnya tergantung pada kehendak rakyat. Rakyatlah pemegang supremasi kekuasaan tertinggi.

Gagasan demokrasi juga semakin berkembang di barat dengan lahirnya gerakan Renaissance (XIV) dan Reformasi (XVII). Gerakan ini telah memberikan cetak biru (*blue print*) berkembangnya gagasan-gagasan demokrasi dengan perjuangannya menentang kekuasaan sewenang-wenang atas nama agama, desakralisasi kekuasaan gereja, memperjuangkan kebebasan beragama, kebebasan

⁴⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berpikir, kebebasan mengemukakan pendapat dan memelopori gagasan-gagasan pembentukan Negara bangsa (*nation states*).⁵⁰ Gagasan demokrasi pada masa *Renaissance* semakin tersebar setelah ditemukannya mesin-mesin cetak. Penemuan teknologi itu memudahkan kaum kaum cendekiawan atau para pemikir bebas menyebarkan gagasan-gagasan kebebasan dan demokrasi melalui media-media cetak seperti : buku, majalah dan Koran. Di atas semua itu, *Renaissance* maupun reformasi menempatkan posisi manusia dalam kedudukan terhormat, dan menunjukkan keberpihakannya terhadap konsep kedaulatan rakyat. Manusia *Renaissance* adalah manusia yang berpikir merdeka (bebas) dan memiliki *human dignity* serta *self-determination* yang kokoh. Mereka tidak lagi sepenuhnya terkukung dogma-dogma Katolisme Abad Pertengahan dan kekuasaan Negara yang menindas.

Gerakan *Renaissance* memberikan fondasi yang kokoh bagi munculnya Abad Pencerahan Eropa (Abad XVIII). Abad Pencerahan merupakan masa dimana gagasan-gagasan demokrasi menjadi perhatian khusus banyak pemikir seperti Rousseau, Locke, Voltaire, Montesquieu, dan lain-lain. Mereka inilah sebagian dari para perintis gagasan-gagasan demokrasi Barat yang dianut dewasa ini. Rousseau dan Lockemerumuskan teori *Trias Politika*, Gagasan dasar teori kontrak sosial adalah:

Pertama: kedaulatan Negara bukanlah sesuatu yang *taken for granted* dan berasal dari tuhan. Kedaulatan merupakan sebuah produk proses perjanjian sosial antara individu dalam masyarakat yang tidak ada sangkut pautnya dengan

⁵⁰ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat (Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan)*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007),h. 299.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendelegasian kekuasaan atau berasal dari Tuhan kepada seseorang penguasa tertentu. Maka, pada dasarnya teori kontrak sosial merupakan suatu teori politik yang sepenuhnya bersifat secular.

Kedua : bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang didasarkan pada kodrat yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal; artinya berlaku untuk semua waktu serta semua manusia, apakah dia raja, bangsawan atau rakyat jelata. Hukum ini dinamakan dengan hukum kodrat.

Ketiga: Karena kekuasaan (kedaulatan) Negara berasal dari rakyat maka harus ada jaminan atas hak-hak individu dalam masyarakat. Hak tersebut antara lain hak-hak civil (*civil rights*) dan hak-hak politik (*political rights*).

Teori *Trias Politica* yang dikembangkan oleh Montesquieu di abad pencerahan itu juga merupakan sumbangan besar bagi gagasan-gagasan demokrasi. Pada prinsipnya teori itu menghendaki adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*) Negara. Kekuasaan Negara tidak boleh tersentralisasi pada seorang penguasa yang berarti kekuasaan tidak boleh bersifat personal (*personal power*) atau hanya dikuasai oleh lembaga politik tertentu.

Montesquieu merumuskan tiga tipologi lembaga kekuasaan Negara yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Masing-masing lembaga ini memiliki peran dan fungsinya sendiri. Montesquieu yakin bahwa dengan pemisahan itu tidak akan terjadi sentralisasi kekuasaan yang menyebabkan lahirnya Negara kekuasaan (*absolute state*). Kemungkinan penyelewengan kekuasaan akan mudah dikontrol. Lembaga legislatif misalnya dapat melakukan kontrol politik terhadap kekuasaan eksekutif bila menyimpang dari perundang-undangan yang telah ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lembaga legislatif. Dengan demikian, lembaga perwakilan rakyat itu memiliki peranan strategis dalam teori kekuasaan *Trias Politica*. Peranan itulah, yang menempatkan lembaga legislatif sebagai garda terdepan demokrasi di Barat.⁵¹

Konsep *checks and balances* yang dijadikan sebagai mekanisme kontrol politik terhadap kekuasaan Negara tidak lain merupakan suatu bentuk elaboratif dari teori *Trias Politica* Montesquieu. Pengaruh teori itu juga tampak pula tampak pada mekanisme politik Amerika dimana seorang presiden tidak dapat diajuhkan oleh kongres selama empat tahun masa jabatannya.

I. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan umum mempunyai esensi sebagai sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan Negara yang pada dasarnya lahir bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan Negara yang benar-benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan. Pada hakikatnya, pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.⁵²

Dalam suatu sistem politik demokrasi, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*free and fair*) adalah suatu keniscayaan. Bahkan, sistem politik apapun yang

⁵¹ *Ibid*, h. 301.

⁵² M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 2.



diterapkan oleh suatu Negara, seringkali menggunakan pemilu sebagai kalimat demokrasi atau sistem politik yang dibangunnya.⁵³

Indonesia mempunyai dua sistem pemilu, yakni sistem Proporsional dan Distrik. Sistem Proporsional adalah *open list system* (sistem daftar terbuka). Dengan sistem ini para pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga calon yang dikehendakinya. Pemilih, disamping mencoblos tanda gambar, juga mencoblos gambar dan nama calon yang dikehendakinya. Sedangkan dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (distrik pemilihan) memilih wakil tunggal atas dasar pluralitas (suara terbanyak).

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia untuk memilih pemimpin rakyat atau pemimpin Negara yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.⁵⁴

Pasal 1 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah: Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵³ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, (Surabaya : Pustaka Eureka, 2006), h.3.

⁵⁴ Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 1997), h.9.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kampanye berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 tahun 2019 di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan baik berdasarkan aturan kampanye yang ditetapkan pemerintahan kabupaten Kampar yang terdapat dalam pasal 43, masih terdapat nya calon kepala desa yang menggunakan tempat ibadah untuk melakukan kampanye dan masih beberapa pelanggaran lain yang dimana hal itu berawal dari ketidak disiplin calon kepala desa dalam mematuhi aturan kampanye yang telah ditetapkan Pemerintah kabupaten Kampar.
2. Faktor penghambat pelaksanaan kampanye pemilihan desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dipengaruhi beberapa faktor, yakni : Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan kampanye, masih ada masyarakat yang kurang paham mengenai aturan saat kampanye pemilihan kepala desa sehingga masyarakat tidak ada melaporkan pelanggaran yang dilakukan calon kepala desa; Kurangnya kepedulian masyarakat, masyarakat tidak paham terhadap aturan kampanye tersebut, namun masyarakat juga tidak mau mencari tahu sehingga dapat dikatakan masyarakat kurang peduli



terhadap aturan tersebut; Kurang nya kedisiplinan calon kepala desa, dimana masih ada calon kepala desa yang melakukan pelanggaran saat melakukan kampanye.

B. Saran

Untuk dapat melaksanakan aturan kampanye yang terdapat dalam Perbup Kampar Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar setelah penulis melakukan penelitian, maka penulis mencoba memberi beberapa saran, diantaranya:

1. Perlunya kesadaran Panitia Pilkades dan masyarakat untuk lebih optimal dalam menjalankan aturan kampanye berdasarkan Perbup Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa agar pelaksanaan kampanye berjalan sebagai mana mestinya.
2. Untuk Calon Kepala Desa diharapkan menjalankan aturan kampanye dengan disiplin dan menghindari melakukan kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 43 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ali Zainudin.2009. *Metode Penelitian Hukum*.Jakarta : Sinar Grafika
- Amiruddin dan Zainal Asikin.2008.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Asfar Muhammad.2006.*Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*.Surabaya : Pustaka Eureka
- B.Soemantri Satriyo.2006. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo Mirriam.2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta
- Dasril Rajab.2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*.Jakarta : PT Rineka Cipta
- Donald Parulian. 1997. *Menggugat Pemilu*. Jakarta : Penebar Swadaya
- Gunawan Totok .2007.*Fakta dan Konsep Geografi*.Jakarta : Inter Plus
- Huda Ni'matul.2011.*Ilmu Negara*.Jakarta : Raja wali Pers
- JurdiFajlurrahman.2018.*Pengantar Hukum Pemilihan*.Jakarta:Kencana Prenadamedia Group
- Juliantara,Dadang.2003.*Pembaharuan Desa Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta :Lappera Pustaka Utama
- Kansil C.S.T.2008. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*.Jakarta:Sinar Grafika
- Kartohadikoesoemo.1984. *Desa*.Jakarta : PN Balai Sartika
- Kuantana Magnar.1984. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonomdan WilayahAdministratif*, Bandung : CV.Armico
- Karim Rusli M.1991. *Pemilu Demokrasi Kompetitif*.Yogyakarta : PT.Tiara Wacana Yogya
- Marwan Awaludin.Sahlan Sartono.2012.*Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar*.Yogyakarta : Thafa Media
- MD Mahfud Mohammad.2003.*Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Poltik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Monteiro Mario Josef.2016.*Hukum Pemerintahan Daerah*.Yogyakarta Pustaka Yustisia
- Satopo HB.1999. *Metode Penelusuran Kualitatif*.Surakarta:UN Press
- Sunggono Bambang.2011. *Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta:Raja Grafindo
- Soekanto soerjono,1984.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Suhartono.2001.*Politik Loca, Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*.Yogyakarta : Lappera
- Suhelmi Ahmad.2007. *Pemikiran Politik Barat (Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan)*.Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sadu Wasistiono.Tahir Irwan.2007.*Prospek Perkembangan Desa*. Bandung : CV Fokus Media,2007

B.Soemantri Satryo.2006. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Widjaja A.W.H.2003. *Pemerintahan Desa/Marga*.Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada

Widjaja,A.W.H.2005.*Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli dan Bulat*. Jakarta : Raja Grafindos

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019, Pasal 43

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, Pasal 41.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2)

Undang-undang Negara Indonesia, Pasal 18 A ayat (2)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18B ayat (2)

Undang-undang Nomor 6 tentang Desa, Pasal 31 ayat (1)



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN BERGELOMBANG (Studi kasus: di desa Rumbio kecamatan Kampar kabupaten Kampar)"* yang ditulis oleh :

Nama : HIJRAH NOVRITI

NIM : 11627203943

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020

Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris

Ilham Akbar, SH., MH

Penguji I

Muslim, S.Ag.,SH., M.Hum

Penguji II

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus S.Ag

NIP.19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/32802
TENTANG



1.04.02.01

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2954/2020 Tanggal 6 April 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

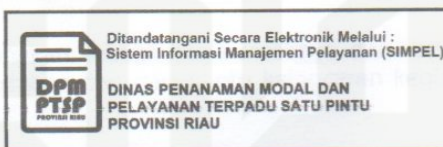
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | HIJRAH NOVRITI |
| 2. NIM / KTP | : | 11627203943 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PASAR RUMBIO |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN BERGELOMBANG DI DESA RUMBIO KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR DESA RUMBIO |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Juni 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© H a milik UIN S ka Riau

State Islamic University of Sultan Syarif

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/445

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33802 tanggal 2 Juni 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : HIJRAH NOVRITI |
| 2. NIM | : 11627203943 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PASAR RUMBIO |
| 7. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN BERGELOMBANG DI DESA RUMBIO KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : KANTOR DESA RUMBIO |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 13 Juli 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,



ANNITA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19661009198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampar di Air Tiris.
2. Kepala Desa Rumbio di Kampar.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA RUMBIO

Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang Km. 46
Dusun Danau Siboghia Kode Pos. 28461

SURAT KETERANGAN
SELESAI KEGIATAN RISET/ PRA RISET

Nomor : 140/SK/DR/150

Kepala Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama | : HIJRAH NOVITI |
| 2. NIM | : 11627203943 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PASAR RUMBIO |
| 7. Lokasi | : KANTOR DESA RUMBIO |

Nama tersebut diatas adalah benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Desa Rumbio dengan judul penelitian **“PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN BERGELOMBANG DI DESA RUMBIO KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR”**.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Rumbio, 13 Juli 2020
a.n. KEPALA DESA RUMBIO
Sekretaris Desa,

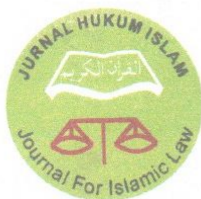
ZULFADDRI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HUIJRAH NOVIRITI

NIM : 11627203189

Program Studi : ILMU HUKUM

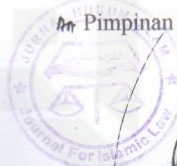
Judul : *Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Bergelombang (Studi kasus : di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)*

Pembimbing : Dr. Abu Samah, SH., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Juli 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU